



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN
MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Biro Hukum.
- KEEMPAT : Sekretaris Jenderal melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI
DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2026

MATRIKS PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

KETERANGAN:

WARNA ABU-ABU	TARGET PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL
WARNA HIJAU	TARGET PENYELESAIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI/RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI

1. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	1. Perencanaan ruang laut; 2. Pemanfaatan ruang laut; 3. Pengendalian ruang laut; 4. Pembinaan penataan ruang laut; 5. Sistem informasi penataan ruang laut; dan 6. Standar basis data penataan ruang laut.													

2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Laut Sehat Bebas Sampah	1. Ketentuan umum; 2. Ruang lingkup; 3. Pengelolaan sampah di kawasan sungai, pesisir, pulau-pulau kecil, pelabuhan, dan aktivitas laut; 4. Sistem informasi laut sehat bebas sampah; 5. Insentif dan disinsentif; 6. Pemantauan dan evaluasi dan pelaporan (penilaian neraca sampah, dan kesehatan laut); 7. Pendanaan; dan 8. Penutup.													
2.	Keputusan Menteri	Adaptasi Perubahan Iklim	1. Perencanaan aksi adaptasi perubahan iklim; 2. Pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim; dan 3. Pemantauan dan evaluasi aksi adaptasi													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			perubahan iklim.													
3.	Keputusan Menteri	Peta Jalan Perdagangan Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2030	Ruang lingkup peta jalan karbon Kementerian Kelautan dan Perikanan mencakup arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan prioritas yang berfokus pada: 1. Ekosistem karbon biru (mangrove dan padang lamun); 2. Perdagangan karbon dari kapal perikanan, lahan budidaya, dan aktivitas <i>cold stroage</i>; 3. Perdagangan karbon (<i>carbon trading</i>), pembayaran berbasis kinerja (<i>result-based payment</i>), dan pungutan atas karbon; dan 4. Penguatan tata kelola, metodologi, dan sistem pemantauan,													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			pelaporan, dan verifikasi (<i>Monitoring, Reporting, and Verification/ MRV</i>).													
4.	Keputusan Menteri	Harga Patokan Pengembangan Produk Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut	Penetapan harga patokan pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko													
5.	Keputusan Menteri	Penetapan Kawasan Konservasi	1. Penetapan kategori kawasan; dan 2. Penetapan zona, batas koordinat dan peta.													
6.	Keputusan Menteri	Status Perlindungan Jenis Ikan	Penetapan jenis ikan yang terancam punah													

3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Keputusan Menteri	Penetapan/ Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan	Menetapkan/ meningkatkan kelas pelabuhan perikanan													
2.	Keputusan Menteri	Rencana Pengelolaan Perikanan	Penetapan rencana pengelolaan perikanan													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
3.	Keputusan Menteri	Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan	Penetapan batas dan luasan wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan													

4. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Alat dan Mesin Untuk Pembudidayaan Ikan	1. Jenis dan standar alat dan/atau mesin; 2. Pengadaan, pengujian, dan sertifikasi alat dan/atau mesin; 3. Peredaran alat dan/atau mesin; 4. Penggunaan alat dan/atau mesin; dan 5. Pengawasan alat dan/atau mesin.													
2.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Obat Ikan	1. Perubahan mekanisme rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan; dan 2. Perubahan mekanisme													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			rekomendasi pengeluaran obat ikan.													

5. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan	1. Perubahan penataan tugas, fungsi, organisasi, dan nomenklatur kementerian negara; 2. Penyesuaian dokumen persyaratan pengusulan rencana kebutuhan impor; dan 3. Pengaturan perubahan alokasi impor yang tidak terealisasi.													
2.	Keputusan Menteri	Pedoman Penghitungan Konsumsi Ikan Masyarakat	1. Pendekatan serapan ikan di dalam rumah tangga setara utuh segar; 2. Metodologi penghitungan; 3. Jenis dan sumber data; dan													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			4. Variabel dan indikator.													

6. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Keikutsertaan Masyarakat Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1. Peran serta masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 2. Kelompok masyarakat pengawas ; 3. Hubungan kerja; 4. Pembinaan; 5. Sumber dana kelompok masyarakat pengawas; 6. Penilaian kelompok masyarakat pengawas; dan 7. Pemantauan dan evaluasi.													

7. Inspektorat Jenderal

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Jenis dan sumber konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Implementasi pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 4. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan konflik kepentingan.													
2.	Peraturan Menteri	Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Perubahan penanganan pengaduan menjadi pengelolaan pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			2. Pengaturan pengelolaan pengaduan berkadar; dan 3. Mekanisme dan tata cara perlindungan baik bagi pengadu maupun pengelola pengaduan.													

8. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kelautan dan Perikanan Secara Wajib	1. Ketentuan umum; 2. Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang kelautan dan perikanan secara wajib; 3. Jenis SKKNI yang diberlakukan secara wajib; 4. Mekanisme pengendalian pemberlakuan SKKNI; dan 5. Pemantauan													1. Melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional; dan 2. Penyelarasan Peraturan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			dan evaluasi.													Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERME N-KP/2018 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kelautan dan Perikanan, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam penerapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia secara wajib berdasarkan aspek keamanan, keselamatan , lingkungan hidup,

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
																dan/atau potensi perselisihan dalam perjanjian perdagangan dan jasa.
2.	Peraturan Menteri	Pembebasan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Penerima pembebasan biaya; 2. Syarat penerima pembebasan biaya; 3. Jenis pembebasan biaya; 4. Tata cara pemberian pembebasan biaya; dan 5. Pemantauan dan evaluasi.													Penyelarasan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik yang Berasal dari Anak Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
																dalam penyelenggaraan satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3.	Peraturan Menteri	Penerapan Kerangka Kerja Nasional Indonesia	Mengatur kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi													1. Melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; dan 2. Bersifat kumulatif terbuka.
4.	Keputusan Menteri	Pembentukan Tempat Kerja Bersama Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1. Penetapan standar tempat kerja bersama; dan 2. Mekanisme pembentukan tempat kerja bersama.													Melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
																tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

9. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	-	-													
2.	Keputusan Menteri	-	-													

10. Biro Perencanaan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Keputusan Menteri	Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026	Menetapkan indikator kinerja utama Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2026													
2.	Keputusan Menteri	Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2027	1. Arah kebijakan, sasaran strategi, program (sasaran program, indikator sasaran program, <i>output</i> program, dan indikator <i>output</i>)													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			program), dan kegiatan (sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan), serta terkait dukungan terhadap prioritas nasional, <i>major project</i> , kegiatan tematik, dan terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2027; 2. Matriks rencana kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2027; dan 3. Rincian komponen kegiatan utama dan dukungan pada terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2027.													

11. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	-	-													
2.	Keputusan Menteri	-	-													

12. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	-	-													
2.	Keputusan Menteri	-	-													

13. Biro Hukum

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Keputusan Menteri	Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2027	Menetapkan program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2027													

14. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	-	-													
2.	Keputusan Menteri	-	-													

15. Biro Umum

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengurangan materi muatan riset dan karantina ikan serta penambahan materi muatan terkait pengelolaan kelautan													

16. Biro Pengadaan Barang/Jasa

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	-	-													
2.	Keputusan Menteri	-	-													

17. Pusat Data dan Informasi

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	-	-													
2.	Keputusan Menteri	-	-													

18. Pusat Kebijakan Strategis

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	-	-													
2.	Keputusan Menteri	-	-													

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO